

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di Provinsi Kalimantan Tengah, Jasa konstruksi, terutama bangunan gedung semakin berkembang, terutama dalam lingkup kegiatan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang berakibat kerugian bagi pemilik pekerjaan, maupun pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Keterlambatan pelaksanaan proyek umumnya selalu menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi pemilik maupun kontraktor, karena berdampak pada konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu dan biaya tambahan.

Pada dasarnya keterlambatan proyek dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya sumberdaya manusia, lokasi pelaksanaan proyek, peralatan yang digunakan, dan lain sebagainya.

Pada lingkup pekerjaan bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup 14 Kabupaten/Kota yang tersebar dan dipisahkan oleh banyak sungai, masalah yang timbul terutama berasal dari faktor Transportasi , cuaca, sumber daya pegawai, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang disiapkan secara lebih terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan yang dikeluarkan daerah, maka salah satu upaya penting yang dilakukan daerah adalah dengan pemahaman persepsi dan peningkatan kemampuan operasionalisasi oleh aparatur pemerintah daerah dalam hal ini Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya memerlukan suatu rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan sehingga rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah pun dapat sejalan dan mempunyai benang merah yang sama. Maka untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dirinci mengenai pendanaan yang dibutuhkan pada setiap kegiatannya yang dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun.

Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. Pr.02.03-Dc/496 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Penyusunan RPJM Bidang Cipta Karya / Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota; Pembangunan nasional harus dilaksanakan

secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Dimana beberapa hal yang mendasari dibutuhkannya Penyusunan Rencana Program Bidang Cipta Karya / Pekerjaan Umum antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan dan pembangunan kabupaten/kota yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau, adil, pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal.
2. Perlunya Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana, dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kota/kab dan pemerataan pembangunan.
4. Permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota baik keadaan ekonomi, sosial, budaya, kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kondisi kapasitas aparatur pelaksana dan tata pemerintahan.
5. Potensi yang dimiliki sebagai masukan penting dari kebijakan payung yaitu RTRW/RPJMN, RPJMD, dan Renstra Cipta Karya dan Renstra Dinas-Dinas belum bersifat operasional.

6. Kebutuhan program pembangunan dan strategi untuk mencapai sasaran program baik pada lingkup kabupaten/kota.
7. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
8. Kebutuhan alat untuk mengoperasikan program atau kegiatan yang sudah dirinci menurut sektor dan bidang yang sudah memiliki besaran/kuantitas, lokasi, indikasi kebutuhan kriteria perkiraan biaya dan penanggung jawab kegiatan.
9. Sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya di daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/kota.
10. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya.

Khusus untuk Bangunan gedung dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana strategi Bidang Cipta Karya :

1. Mendayagunakan dan menertibkan pemanfaatan Pemukiman dan prasarana wilayah yang telah dibangun.
2. Pembangunan Pemukiman dan prasarana wilayah lebih menitik beratkan pada daerah pedalaman dalam rangka membuka daerah terisolasi dan terbelakang.
3. Memanfaatkan dan meningkatkan Prasarana wilayah yang telah dibuat oleh pengembangan Perumnas yang telah diserahkan kepada pemerintah.

4. Menerapkan standar teknologi yang berkualitas dalam pembangunan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin bahan baku, sehingga biaya pemeliharaan dapat diminimalkan.
5. Membina pengusaha jasa konstruksi dan memberdayakan pengusaha menengah dan kecil.

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan menjaga kondisi prasarana wilayah yang sudah mantap.
2. Meningkatkan kemampuan prasarana wilayah yang sudah menurun tingkat pelayanannya.
3. Membuka daerah-daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan menunjang pengembangan wilayah.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah.
5. Memberi kesempatan berusaha di bidang jasa Bidang Cipta Karya secara adil, terbuka dan transparan pada masyarakat dunia usaha jasa konstruksi.

Dalam menangani Bidang Cipta Karya tersebut di atas, di bentuk proyek-proyek :

1. Pembangunan fasilitas pemerintahan.
2. Peningkatan sarana pendukung pemerintahan dan wilayah.
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas Pemerintahan dan Umum.

Sekilas gambaran singkat Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur - 115°51' Bujur Timur.
2. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas 153.564,00 km<sup>2</sup> atau 8,04 persen dari luas Indonesia, merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Papua.
3. Pada tahun 2014, Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota dimana Murung Raya merupakan wilayah terluas (23.700 km<sup>2</sup>) dan Kota Palangka Raya merupakan wilayah terkecil di Provinsi Kalimantan Tengah (2.400km<sup>2</sup>).
4. Kalimantan Tengah di bagian utara dibatasi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
5. Sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
6. Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau.

Di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri dari :

- a. Jenjang S1 20 orang ( 13 PNS, 7 Honorer)
- b. Jenjang D3 8 orang ( 8 PNS )
- c. Jenjang SMK/ sederajat 25 orang ( 9 PNS, 16 Honorer)

Dengan jumlah pegawai yang ada kami di tuntut bekerja keras untuk menangani proyek-proyek yang 4 tahun terakhir, Dinas pekerjaan Umum mendapat Porsi 30 % dari APBD Provinsi yang kisaran pakatnya 30 – 100 paket per tahun anggaran, adapun dari jumlah pegawai yang ada harus di butuhkan 5 – 7 orang untuk menjadi tenaga panitia pengadaan barang/jasa (panitia lelang). Jadi tenaga yang siap untuk menjadi pengelola proyek sekitar 38 orang yang di dalamnya merangkap Pejabat Pembuat komitmen atau Pimpro. Direksi Pekerjaan dan pengawas lapangan. Kalau di total setiap tahun kurang lebih satu orang jenjang S1 ( PPK) menangani 5 – 10 paket per tahun begitu juga direksi dan pengawas mendapat bagian yang hampir sama, itu pun kami harus melaksanakam survey (Pre Constuction) dan mendesain gambar dan membuat Rencana Anggaran Biaya. Itu pun kami sesuaikan lagi kalau pada tahun anggaran yang bersamaan ada paket APBN seperti PKPS-BBM, P2KP, P2DTK serta Paket bantuan Bencana Alam. Dengan tenaga yang sangat minim tidak ada pilihan lain selain harus mengemban dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab.

Proyek dibagi menjadi beberapa bagian proyek yang dipimpin oleh pemimpin bagian proyek.

Tujuan dibentuknya proyek-proyek tersebut di atas adalah meningkatkan peranan pelayanan pemerintah guna pengembangan wilayah yang dapat memperlancar pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor yang penting dalam mencapai tujuan proyek adalah sistem pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pengendalian pelaksanaan harus dilakukan secara sistematis terarah dan terpadu agar sasaran proyek (waktu, mutu dan biaya) dapat dimonitor setiap saat dan dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab proyek-proyek Prasarana wilayah sering menghadapi masalah pengendalian. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan masih adanya beberapa paket proyek yang menyelesaikan pekerjaannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian kontrak. Penyebab keterlambatan ini adalah karena pelaksanaan dan pengawasan yang kurang baik, transportasi dan cuaca, jumlah pegawai yang minim.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik dan ingin mendalami lebih lanjut masalah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bidang Cipta Karya khususnya bangunan gedung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari faktor Transportasi ,cuaca, sumber daya pegawai, pelaksanaan dan pengawasan, faktor manakah yang paling dominan menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan Gedung pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

## **1.4 Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan

Gedung pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proyek-proyek Bidang Cipta Karya dalam mengetahui Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek-proyek Bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Untuk mempermudah melaksanakan penelitian, maka batasan penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Penelitian hanya dilakukan pada pengelola proyek yang dilaksanakan dalam lingkup kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014, 2015, 2016.
2. Pengumpulan data untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan keterlambatan proyek, hanya dilakukan pada Pegawai, Kontraktor, dan Konsultan yang menangani proyek – proyek tersebut.